

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Teori Negara Kesejahteraan	13
2. Teori Otonomi Daerah	16
3. Teori <i>Good Governance</i>	17
4. Teori Konflik Kepentingan	19
F. Penelitian Terdahulu	20

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	24
	A. Teori Negara Kesejahteraan.....	24
	B. Teori Otonomi Daerah.....	35
	C. Teori <i>Good Governance</i>	53
	D. Teori Konflik Kepentingan.....	19
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	84
	A. Metode dan Pendekatan.....	84
	B. Jenis Dan Sumber Data.....	84
	C. Teknik Pengumpulan Data	86
	D. Teknik Analisis Data.....	87
	E. Lokasi Penelitian.....	88
BAB IV	ANALISIS TENTANG IMPLIKASI HUKUM DINASTI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.....	89
	A. Implikasi Dinasti Politik Dalam Praktik Dinasti Politik Di Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.....	89
	1. Sejarah dan Dinamika Dinasti Politik di Indonesia	89
	2. Dinamika Pengaturan Dinasti Politik di Indonesia	98

3. Perbandingan Hukum Dinasti Politik.....	111
4. Praktik Dinasti Politik Di Berbagai Daerah Di Indonesia.....	115
5. Praktik Dinasti Politik Di Kabupaten Probolinggo.....	121
6. Implikasi Dinasti Politik Dalam Praktik Dinasti Politik Di Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.....	130
B. Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Dalam Menyikapi Implikasi Hukum Dinasti Politik.....	143
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	165

